

DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH DAN DINAMIKA IDENTITAS BUDAYA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Oleh: I Ngurah Suryawan

Abstract

This article tries to elaborate implications of grand design planning of the Indonesia Government in Papua, especially in the province of West Papua towards cultural identity of Papua which are heterogenic and dynamic. The set up are which is associated with expansion areas make a new interconnection identity space of culture of Papua society with a new culture that brought by expansion areas planning. In these moments, conflict occur which is dominated by political economy contestation. Yet, one of the biggest challenges on expansion areas is whether return to the originality of Papua culture based ethnicity or think for the outside world and a desire to always renew its cultural identity.

Kata kunci: penataan (pemekaran) daerah, dinamika, identitas budaya

Pendahuluan

Masing-masing bangsa memiliki tradisi, konsep agama, struktur sosial dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Ini juga termasuk budaya material dan bentuk ekonomi yang sudah tentu berbeda. Keanekaragaman bangsa Papua sangatlah tinggi. Ini ditunjukkan dengan adanya lebih dari 253 bahasa. Terdapat tiga wilayah geografis yang berbeda yang menentukan cara hidup rakyat Papua yaitu daerah pantai yang dihuni oleh nelayan dan pelaut; daerah pegunungan yang dihuni oleh para petani; serta daerah tanah rawa yang sangat jarang penduduknya. Dasar dari sukubangsa Papua adalah Heterogenitas, demikian juga dasar dari Indonesia sendiri. Namun, perbedaan yang paling kentara adalah budaya-budaya di Papua tersebar, tidak seperti yang terlihat pada budaya Jawa dan Bali dimana budaya-budaya fokus dan tidak tersebar (Zolner, 2006: 66; Laksono, 2009a).

Identitas bagi bangsa Papua sendiri awalnya berarti identitas sekelompok kecil: keluarga, desa kecil atau sekelompok kecil desa-desa. Identitas kelompok kecil atau pribadi itu didefinisikan melalui bahasa,

tradisi keluarga, agama, budaya dan cara hidup secara umum yang biasanya berbeda dengan tetangganya. Masing-masing bangsa di tanah Papua mempunyai identitasnya masing-masing, yang ditunjukkan dengan menyatakan dirinya manusia, orang-orang yang kemudian ditambahkan dengan nama desa atau sungai asal mereka.

Pada tahun 1900 mulai berkembang identitas umum orang Papua yang kemudian pada tahun 1898 melalui pemerintah Kolonial Belanda membentuk pusat pemerintahan di Manokwari. Melalui misi Kristen, masuklah para pengajar dan penginjil di pantai utara. Kontak yang terus menerus dengan orang asing menumbuhkan identitas Papua melebihi yang mereka alami sebagai kelompok kecil sebelumnya. Agama, dalam hal ini agama Kristen, ikut berperan dalam menumbuhkan identitas budaya Papua meskipun identitas sekelompok kecil Papua tetap utuh.

Identitas ke-Papuan-an tumbuh beriringan dengan sejarah pergolakan kekuasaan yang dialami negeri Cenderawasih ini. Tahun 1961, Dewan Papua sepakat menyebut wilayah mereka adalah Papua Barat, berbeda dengan nama yang dipakai Pemerintah Indonesia ketika mengambil alih kekuasaan pada tahun 1963 atas daerah ini. Pemerintah Indonesia memberikan nama wilayah ini adalah Irian Barat yang kemudian berubah menjadi Irian Jaya pada tahun 1969. Nama Irian sering diartikan sebagai Iku Republik Indonesia Anti Nederland (IRIAN). Akan tetapi, orang Papua membenci nama Irian Jaya karena menjadi simbol penghinaan Indonesia terhadap budaya Papua. Pada 1998 setelah angin reformasi berhembus, rakyat Papua menuntut daerah mereka dinamai Papua atau Papua Barat. Pada 1 Januari 2002 ketika Undang-Undang Otonomi Khusus diberlakukan, nama Papua secara resmi digunakan.

Heterogenitas etnik yang tinggi, kebudayaan dan kompleksitas adat serta gerakan sosial di tanah Papua memiliki sejarah yang kompleks dan penuh dengan ketegangan dan konflik. Terdapat lebih dari 253 etnik dengan bahasa, struktur sosial, tradisi, sistem kepercayaan/agama, dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Kompleksitas persoalan di Tanah Papua terjadi seiring dengan peralihan kekuasaan-kekuasaan (politik) terhadap tanah Papua (Widjojo dkk, 2009). Salah satu momen penting pentas kekuasaan terhadap tanah Papua terjadi pada tahun 1940-an hingga 1960-an. Saat itu terjadi Perang Dunia II yang berimplikasi kepada proses penyerahan kedaulatan Belanda atas Indonesia termasuk di dalamnya Papua. Proses peralihan kekuasaan di Papua berujung kepada Penentuan

Pendapat Rakyat (Pepera) Juli-Agustus 1969 yang menyatakan bahwa Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, sejarah Papua setelah 1969 menunjukkan bahwa hasil Pepera itu justru menjadi salah satu akar konflik yang berkepanjangan (Widjojo dkk, 2009).

Desain besar penataan daerah di Indonesia 2010-2025 menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat bisa dikembangkan lagi menjadi Provinsi Papua Barat Daya (Provinsi Sorong Raya). Dua provinsi baru lagi adalah pemekaran dari Provinsi Papua yaitu Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan. Penataan daerah yang dimaksudkan dalam studi ini bertujuan untuk; peningkatan pelayanan publik, percepatan demokratisasi, percepatan pembangunan perekonomian daerah, pengembangan potensi daerah, peningkatan keamanan, keterbiban, dan memperpendek rentang kendali pemerintahan (Kementerian Dalam Negeri dan Kemitraan, 2011: vi).

Selama rezim otoritarian Orde Baru berkuasa, diskriminasi pembangunan, rentetan kekerasan hak asasi manusia, dan tersumbatnya ekspresi identitas sosial dan budaya bangsa Papua menjadi ingatan bersama rakyat Papua. Jatuhnya rezim Orde Baru membuka peluang rakyat Papua untuk menunjukkan ekspresi tuntutan kemerdekaan kepada Indonesia. Presiden BJ Habibie ketika itu mengakomodasi tuntutan para elit Papua yang disebut dengan Tim 100 dengan mengadakan dialog pada Februari 1999. Namun, oleh pemerintah Indonesia, tuntutan kemerdekaan rakyat Papua yang sangat sensitif tersebut direspon dengan turunya Undang-Undang yang sama sekali tidak berjalan ketika itu yakni Undang-Undang (UU) Nomor 45 tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya yang mengatur pemekaran Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Mimika, Jayapura dan Kota Sorong pada 4 Oktober 1999.

Tentu saja keluarnya UU itu menuai protes keras dari rakyat Papua. Hadirnya UU tersebut seolah memberikan peluang untuk memecah belah Tanah Papua. Tuntutan kemerdekaan semakin menguat sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia. Masa inilah yang sering dinamakan *Papuan Spring* (1999-2000), dimana kemerdekaan memperoleh maknanya yang kuat dalam menunjukkan identitas sosial budaya dan harga diri menjadi bangsa Papua. (Timmer, 2007). Untuk meredam gejolak tuntutan kemerdekaan itulah pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU

Otsus) yang ditandatangani Presiden Indonesia ketika itu, Megawati Soekarnoputri dan mulai diberlakukan pada 21 November 2001. Dalam pasal 76 UU Otsus dinyatakan: “Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.”

Dinamika pemekaran daerah di Papua berawal dari terpecahnya Provinsi Papua menjadi Irian Jaya Barat (kini bernama Provinsi Papua Barat). Berdirinya provinsi baru yang sebelumnya bernama Irian Jaya Barat berawal dari dialog antara tokoh-tokoh masyarakat Irian Jaya Barat dengan pemerintah Indonesia pada 16 September 2002 di Jakarta. Para tokoh-tokoh masyarakat Papua ini menyampaikan agar pemerintah Indonesia segera mengaktifkan kembali Provinsi Irian Jaya Barat yang sudah ditetapkan pada 12 Oktober 1999. Provinsi Irian Jaya Barat didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 45/1999 dan dipercepat dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2003. Peresmian Kantor Gubernur Irian Jaya Barat oleh Pejabat Gubernur Abraham Oktavianus Ataruri berlangsung pada 6 Februari 2003 (Pamungkas, 2004; Suryawan, 2013).

Selain Otsus Papua, keinginan Pemerintah Indonesia di Jakarta untuk melakukan “demam pemekaran” di Tanah Papua terlihat jelas. Mendagri saat itu, Mardiyanto saat melantik lima pejabat Bupati di lima kabupaten baru di daerah Pegunungan Tengah, Papua (Lani Jaya, Puncak, Yolimo, Nduga, dan Mamberamo Tengah) menyatakan bahwa pemekaran masih sangat diperlukan Papua (Brata, 2008: 6). Pernyataan Mendagri saat itu jelas memberikan kesan bahwa pemerintah masih membuka pintu bagi usulan-usulan baru pemekaran di tanah Papua. Menurut Mendagri, ada dua alasan utama mengapa pemekaran di Papua sangat dibutuhkan. *Pertama*, kondisi Papua yang begitu luas, dan *kedua* untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hampir semua pemekaran daerah menggunakan argumen kesejahteraan masyarakat, sehingga bukan hal yang spesifik kepada Papuanya. Sedangkan dari sisi luasnya wilayah, Papua memang jauh lebih luas ketimbang wilayah lain di Indonesia. Kalau pertimbangan ini digunakan secara bebas, maka di atas kertas akan ada begitu banyak daerah di Papua.

Pemberlakuan undang-undang otonomi khusus dan tumbuh subur nya pemekaran daerah-daerah di Papua pantas diduga memperumit

transformasi identitas budaya dan politik yang sangat pelik. Identitas budaya Papua tumbuh dalam teritorialisme daerah-daerah baru dan semakin menguatnya politik budaya etnik/bangsa-bangsa di wilayahnya masing-masing. Bukan hanya itu, konflik-konflik yang terjadi di daerah-daerah pemekaran akibat pertarungan memperebutkan sumber-sumber daya alam, perebutan sumber-sumber ekonomi lain, akses, kekuasaan politik lokal dan adalah ketegangan antara berbagai etnisitas dan agama. Yang tidak kalah pentingnya adalah ketegangan (baca: kekalahan) orang lokal Papua dengan para migran semisal dari Jawa dan BBM (Buton, Bugis, Makassar) yang sering disebut sebagai salah pemantik marginalisasi orang lokal Papua di tanahnya sendiri. Kondisi yang terjadi adalah polarisasi identitas ke-Papua-an kedalam bentuk persaingan-persaingan dan konflik-konflik lokal dalam bentuk perebutan tetesan sumber daya, akses ekonomi politik, pertikaian etnisitas dan kepentingan wilayah.¹ Fragmentasi yang terjadi pada daerah-daerah pemekaran itulah yang diduga menimbulkan ketegangan-ketegangan pada komunitas etnis lokal di tanah Papua demi kepentingan politik dan janji-janji keuntungan ekonomi.

Ketegangan dan fragmentasi terekspresikan dalam serangkaian konflik para elit lokal dari birokrasi, kelompok agama, dan adat yang berlangsung antara mendukung dan menolak pemekaran. Lebih jauh, fragmentasi (keterpecahan) ini justru menjadi pemantik munculnya DOB (Daerah Operasional Baru) yang melibatkan kontestasi berbagai kepentingan. Terbentuknya kabupaten baru di Provinsi Papua Barat seperti Kaimana, Teluk Wondama, Sorong Selatan, Maybrat, dan dua yang terbaru yaitu Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak menggambarkan begitu bergairahnya keberlangsungan pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua Barat ini. Di tengah diversitas budaya yang tinggi di wilayah *vogelkoop* (kepala burung) ini, selalu muncul keinginan untuk memecah wilayah kembali dalam bentuk kabupaten-kabupaten baru. Demam pemekaran sangat jelas terlihat dari keinginan “rakyat Papua” untuk memekarkan daerahnya menjadi 33 DOB, 10 DOB adalah hasil pemekaran di Provinsi Papua Barat (Tabloid Jubi, 25 Oktober 2013, diakses 12 Januari 2014). Hal ini sangat mencengangkan sekaligus mengundang keprihatinan akan proses dan dampak yang akan terjadi.

¹ Bahkan Chauvel (2005, 2008 dalam Timmer, 2007) berani menyebutkan bahwa kebijakan otsus dan pemekaran hanya akan menjadikan perebutan kedudukan dengan mempertontonkan kepentingan-kepentingan wilayah dan kesukuan secara politis.

Artikel ini mendalami dinamika pemekaran daerah yang berlangsung khususnya di Provinsi Papua Barat yaitu rencana terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Di sisi lainnya juga akan diuraikan konflik etnik yang terjadi dari pemekaran Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat. Kedua kasus ini menggambarkan secara jelas bagaimana implikasi pemekaran daerah terhadap dinamika etnik tersebut. Setiap etnik merasa paling berhak dan berjasa dalam terjadinya pemekaran tersebut sehingga menguasai akses ekonomi politik. Pada bagian selanjutnya akan dielaborasi tantangan yang dihadapi oleh pemekaran daerah terhadap dinamika identitas budaya yang heterogen dan dinamis. Pertanyaannya adalah apakah pemekaran-pemekaran daerah memikirkan konteks sosial budaya dan melayani heterogenitas budaya etnik Papua yang kompleks tersebut? Atau justru yang terjadi adalah logika-logika yang digunakan hanya terbatas kepada ekonomi politik tanpa sedikitpun merekognisi dan memikirkan implikasi dari interkoneksi budaya masyarakat etnik dengan introduksi pemekaran daerah.

Bagian awal artikel ini akan memetakan secara umum dinamika pemekaran daerah yang berlangsung di tanah Papua dan relasinya dengan heterogenitas budaya dan etnik. Bagian selanjutnya mengelaborasi dinamika pemekaran daerah yang terjadi di Kota Sorong, tepatnya ide dan dilanjutkan dengan deklarasi pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dinamika dan konflik dalam pembentukan Kabupaten Maybrat juga menjadi contoh lainnya dari terbentuknya DOB (Daerah Otonomi Baru) Provinsi Papua Barat. Bagian terakhir memuat refleksi dari desain besar penataan daerah terhadap dinamika identitas budaya Papua yang heterogen dan dinamis.²

Candu Penataan (Pemekaran) Daerah

Perbincangan dan gerakan-gerakan politik tentang pemekaran bagai candu bagi sebagian (elit) rakyat Papua. Wacana ini berkembang dan menjadi topik hangat di media massa, *para-para* (tempat berkumpul untuk

² Sebagian besar perspektif dari artikel ini adalah bagian dari draft awal saya dalam studi tentang Kajian Desain Penataan Daerah Papua Barat: Perspektif Sosial Budaya kerjasama IFGI dan Kemitraan 2014 dengan judul "Pengembangan Desain Besar Penataan Daerah Papua Barat: Kajian Sosial Budaya". Data-data lainnya adalah hasil penelitian lapangan saya dalam penelitian "Dinamika Politik Lokal Pemilu 2014 di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat" kerjasama Jurusan Politik Pemerintahan (JPP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Australia National University (ANU) Maret-April 2014.

berdiskusi) beberapa rumah masyarakat yang saya jumpai, hingga diskusi para dosen di sela-sela kelas perkuliahan di kampus saya. Tapi, ketika saya tanya mama penjual sayur dan pinang dekat asrama dosen tempat saya tinggal, mama menjawab enteng, “*Epen kah barang itu (epen = emang penting, barang itu = pemekaran daerah)*”³

Namun, saya salah besar jika menganggap *barang* pemekaran ini tidak serius seperti yang diungkapkan mama penjual sayur langganan saya. Pada sebuah kesempatan mengunjungi Kota Sorong akhir Januari 2014, saya menyaksikan dan menangkap kesan yang sangat gamblang bagaimana wacana pemekaran menjadi pembicaraan yang sangat menggairahkan. Paling tidak itu yang saya saksikan di ruang depan hotel yang berlokasi di depan Tembok Berlin di Kota Sorong. Para elit-elit lokal dengan berpakaian rapi dan bersepatu kulit sejak dari sarapan hingga melewati makan siang hari begitu asyik berdiskusi menghabiskan waktu mereka ditemani rokok dan sirih pinang. Saya perhatikan dan mendengarkan beberapa bagian pembicaraanya seputar persoalan pemekaran daerah di kawasan kepala burung Papua. Sebagian besar diantara mereka merasa menjadi “putra asli” dan berhak atas fasilitas yang nanti didapat melalui pemekaran daerah. Seperti misalnya para kontraktor yang menuntut jatah proyek dari pemerintah atau para elit-elit kepala kampung yang berkeinginan keluarga atau kerabatnya menjadi pegawai di pemerintahan (baca: PNS=Pegawai Negeri Sipil).⁴

Saya merasakan pergunjungan dan gosip politik yang tidak jelas ujung pangkalnya tentang pemekaran daerah menjadi candu yang menggiurkan sekaligus memabukkan, khususnya bagi para elit lokal dan secara pelan namun pasti hingga ke *grass root*. Berita media-media massa pun membahas tentang pro dan kontra seputar wacana pemekaran daerah yang terus-menerus terjadi tanpa henti. Wacana pemekaran telah menjadi konsumsi publik dan menjadi penegasan bahwa perbincangan tentang politik menjadi hal yang dominan tentang Papua melebihi hal yang lain.

Beberapa bagian masyarakat dan elit lokal terus memperjuangkan pemekaran, sebagian elemen masyarakat lainnya justru menolaknya dengan berbagai alasan. Mulai dari membuka peluang migrasi para pendatang, ketersingkiran orang asli Papua di tanahnya sendiri, hingga

³ Catatan lapangan di sekitar wilayah Amban Kabupaten Manowkari, Februari 2014. *Epen kah* (emang penting) adalah bahasa yang sering digunakan untuk menunjukkan ketidakpedulian terhadap sebuah persoalan atau hal lain yang tidak diminati.

⁴ Catatan lapangan di Kota Sorong awal Februari 2014.

korupsi ekonomi dan politik yang melibatkan para elit lokal Papua dan beberapa elemen masyarakat yang menjadi solusinya. Cita-cita luhur pemekaran untuk mensejahterakan masyarakat seakan pelan namun pasti menjadi jauh dari harapan. Kesejahteraan rakyat telah dirampas oleh sebagian kelompok masyarakat dalam komunitas mereka sendiri. Intinya terjadi keterpecahan yang akut di tengah masyarakat antara yang berapi-api memperjuangkan pemekaran dan menolaknya karena akhirnya menjadi candu yang melumpuhkan.

Salah satu penolakan pemekaran daerah datang dari Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang menyatakan, "Rakyat Papua tidak membutuhkan pemekaran di tanah Papua. Untuk itu, saya menolak seluruh usulan Daerah Otonomi Baru," kata Gubernur Lukas Enembe melalui kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Sendius Wonda. Selanjutnya, Lukas Enembe mengungkapkan, "Atas nama Gubernur Papua, kami tegaskan, Gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah, maka pemerintah Pusat dan komisi terkait bila syarat-syarat yang dimaksud tidak memenuhi, maka sebaiknya DPR RI menolak dan mengembalikan ke daerah untuk memenuhi prosedur atau persyaratan tersebut, karena dari sekian DOB dari Papua yang baru masuk di Komisi II DPR RI sebagian lompat tanpa mendapatkan persetujuan dan Rekomendasi DPRD dan Gubernur Papua." DPRD juga menyatakan penolakannya melalui Ruben Magai sebagai Ketua Komisi A yang membidangi Politik, HAM dan Hukum. "Untuk membangun Papua hanya membutuhkan kewenangan. Bukan pemekaran provinsi. Selama ini banyak janji-janji negara dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang tidak terwujud di Papua," kata dia. "Mereka pakai alasan kesejahteraan, tetapi banyak kabupaten pemekaran di Papua tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat Papua. Untuk itu, Jakarta harus bisa melihat masalah Papua secara baik," tegasnya (Majalah Selangkah, diakses 12 Januari 2014).

Elite-elite Papua sejak masa Gubernur J. Patipi, telah mempersiapkan Papua ke depan akan terpecah menjadi 6 propinsi berdasarkan etnografi, yaitu bagian kepala burung (ritus Kain Timor), bagian sayap (ritus Bomberai), teluk cendrawasih (ritus Saireri), pantai utara (ritus Tabi/humbolt), pantai selatan (ritus H-Anim), dan pegunungan tengah (Lani/Dani). Pembagian ini berdasarkan UU 45/1999 tentang pemekaran Papua dan UU 21/2001 tentang Otsus yang mensyaratkan kesamaan sosial budaya masyarakat di tiap satuan wilayah pemekaran.

Namun dalam perkembangannya menurut perhitungan berbagai pihak, kemungkinan besar akan ada 7 propinsi yang bakal terbentuk yakni; bagian barat daya (Papua Barat Daya), bagian barat (IJB yang pada tanggal 7 Februari 2007 dideklarasikan berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat), bagian teluk cendrawasih (Teluk Cendrawasih), bagian selatan (Papua Selatan), bagian pegunungan tengah (Papua Tengah), bagian timur yang merupakan propinsi induk (Papua), serta bagian utara (Papua Utara) (Prakarsa Rakyat, 29 Maret 2007).

Pendekatan terhadap Papua dalam berbagai kajian-kajian akademik rekomendasi kebijakan hampir selalu menempatkan faktor sosial-budaya menjadi faktor yang kontribusinya sangat minim dibandingkan dengan ekonomi dan politik. Kementerian Dalam Negeri dan Kemitraan (2010:27) dalam kajiannya tentang Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia ini merekomendasikan bahwa kajian sosial budaya menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan sebelum melakukan pemekaran daerah.

Dimensi sosial budaya yang diantaranya dimaksudkan dalam kajian ini adalah memperhatikan konteks sosial budaya sehingga tidak terjadi konflik antar etnis, agama, ras, kelompok kepentingan dan mendorong semakin kuatnya kelekatan sosial antar berbagai perbedaan yang ada di daerah. Intinya, motivasi pemekaran daerah berdasarkan atas sentimen suku dan kekerabatan. Hal lain yang patut dipertimbangkan juga adalah kemungkinan pemekaran daerah menghilangkan suatu budaya lokal dan dominasi satu budaya dengan budaya lainnya. Justru yang diharapkan adalah pengembangan dan penerimaan budaya atas budaya lainnya.

AAI (Asosiasi Antropologi Indonesia) pada tahun 2011 mengeluarkan catatan kritis menuju Papua Tanah Damai. Dalam salah satu poin catatannya, AAI menekankan bahwa Papua adalah masyarakat yang majemuk. Pertanyaan “siapa Papua” pada dasarnya dapat memunculkan wajah kehidupan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Papua adalah wajah wilayah kultural yang sangat kompleks. Kompleksitas ini tidak saja bersifat horizontal (yang berdasarkan ciri-ciri turunannya) melainkan juga bersifat vertikal yang bermakna bahwa masing-masing kelompok memiliki perbedaan hirarkial dalam hal kemampuan beradaptasi dengan perkembangan yang ada di lingkungannya.

Ekstremnya kondisi geografis dan terisolirnya sebagian masyarakat Papua membuat mereka hidup dalam tradisi kelompok-kelompok kecil yang berorientasi pada identitas kesukuan berdasarkan perbedaan bahasa

dan budaya masing-masing. Kompleksitas dan heterogenitas kesukuan, bahasa, dan budaya inilah yang perlu dikenali untuk kemudian memahami dinamika relasi-relasi sosial budaya yang berkembang hingga saat ini di Papua. Lebih jauh, introduksi berbagai program-program pembangunan dan interkoneksi dengan kuasa kapital global lewat kehadiran investor membuat perlahan namun pasti keterisoliran yang dibayangkan dalam studi-studi kebudayaan tradisional tentang Papua menjadi salah kaprah.

Papua Barat dalam pembagian 7 wilayah adat di Papua termasuk dalam wilayah budaya III Bomberai (Papua Barat Laut) dan wilayah budaya IV Domberai (Papua Barat). Wilayah budaya III Bomberai terdiri dari 52 suku dan terletak di Papua Barat Laut sekitar Sorong Manokwari, meliputi: Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama, Wasi, Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, Inawatan, Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo. Sementara wilayah budaya IV terletak di Papua Barat terdiri dari 19 suku terletak di wilayah Fakfak, Mimika dan sekitarnya yang meliputi: Fakfak, Kaimana, Kokonao, Mimika.

Pembagian wilayah budaya yang sering dikenal ini menurut Flassy (1995:11) merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesukaran yang ditemukan dalam kekayaan diversitas budaya yang ada di Tanah Papua. Oleh sebab itulah dicari pemecahannya dengan jalan mereduksinya ke dalam jumlah-jumlah yang lebih kecil melalui konsep "wilayah budaya". Pengertian dari konsep ini adalah menyatukan sejumlah komunitas yang terdapat di seluruh daerah meskipun masing-masing relatif masih memperlihatkan perbedaan yang bervariasi.

Reduksi budaya melalui pembagian wilayah budaya seperti diungkapkan oleh Flassy (1995) kini memantik kompleksitas persoalan seiring dengan perjalanan Papua menjadi wilayah yang terus berkembang dan mengalami transformasi sosial-budaya yang tak terhindarkan. Salah satu persoalan yang berada di depan mata adalah gairah pemekaran daerah yang tak terbendung di Papua yang menyeret persoalan sentimen kekerabatan (suku) dan juga etnik. Usulan DOB dikhawatirkan berimplikasi fragmentasi (keterpecahan) pada masyarakat Papua sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itulah menjadi patut dipertanyakan kembali reduksi budaya dalam 7 wilayah budaya di Tanah Papua masih relevan untuk menjelaskan dinamika pemekaran daerah dan relasi-relasi sosial yang semakin kompleks. Beberapa kontestasi pemekaran akan coba diuraikan sebagai contoh.

Dalam studinya, Timmer (2013:22) mencoba menunjukkan bahwa kajian budaya dan bahasa di Papua pada masa kolonial dan diwariskan hingga kini memperlihatkan adanya variasi yang tinggi. Hal ini mengundang kita melakukan reduksi untuk menarik batas dan menjelaskan karakteristik yang bervariasi tentang budaya dan bahasa di Papua yang eksotis dan terlokalisir tanpa adanya mobilitas dan transformasi. Pandangan kulturalisme ini sangat menyesatkan karena hanya melihat orang Papua hanya ditentukan oleh budayanya sehingga budaya ini membentuk sebuah kesatuan organik yang utuh dan tertutup, sehingga orang Papua tidak dapat meninggalkan budayanya tetapi hanya dapat merealisasikan dirinya di dalam budayanya.

Gairah dan dinamika pemekaran daerah serta transformasi sosial budaya yang terjadi hampir seluruh Tanah Papua menggambarkan bagaimana relasi antar manusia dengan berbagai siasat dan manuvernya yang jauh melampaui sistem tradisional yang tertutup. Kelompok-kelompok, jaringan, pertukaran-pertukaran dan keseluruhan relasi-relasi antar orang Papua menghasilkan dinamika pemekaran daerah yang terjadi seperti sekarang ini. Introduksi dari pembangunan dan hadirnya perusahaan (baca: investasi global) seolah menegaskan bahwa komunitas adat dan kebudayaannya akan sangat salah kaprah jika dianggap “murni”, “otentik”, “eksotis” dari polusi-polusi pengaruh dari interkoneksi global yang menysar kampung-kampung. Introduksi pembangunan dan investasi sebagai kesadaran baru melepaskan relasi historis rakyat dengan tanah/hutannya (Laksono 2002).

Di tengah kondisi seperti diungkapkan di atas, memecah daerah berdasarkan karakteristik sosial budaya menjadi sangat sumir dan tidak meyakinkan. Argumentasinya adalah semakin dinamis dan terus berubah-ubahnya karakteristik budaya Papua di setiap wilayahnya. Ditambah lagi dengan relasi antar manusia yang membuat kita melihat bahwa orang Papua dapat berpikir melampaui batas-batas budaya dan dapat bersatu demi kepentingan-kepentingan tertentu.

Rencana Provinsi Papua Barat Daya (Sorong Raya) dan Konflik Kabupaten Maybrat

Bagian ini akan lebih mendiskusikan kehadiran ide pembentukan Provinsi Papua Barat Daya atau sering juga disebut sebagai Provinsi Sorong

Raya yang terlepas dari provinsi induknya yaitu Provinsi Papua Barat. Selanjutnya akan digambarkan konflik yang terjadi di Kabupaten Maybrat terkait dengan pemilihan bupati, pemindahan ibukota kabupaten, dan juga dakwaan korupsi terhadap bupati terpilih Drs. Bernard Sagrim, MM. Bagian ini menggambarkan bagaimana gerakan pemekaran daerah yang dimotori oleh para elit lokal menciptakan konflik di tengah masyarakat yang mempengaruhi jalannya pemerintahan dan pelayanan pembangunan kepada masyarakat. Keberhasilan pemekaran daerah di wilayah lain di Papua menjadi motivasi daerah-daerah lain membuat hal yang sama. "Kalau *dong* bisa kenapa *tong tra* bikin juga *toh*," ungkap seorang calon anggota legislatif di wilayah Ayamaru saat berkomentar tentang pemekaran daerah di wilayah Sorong Raya.⁵

Ide pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (Sorong Raya) dari tahun 2007 sudah didengung-dengungkan dan kemudian dideklarasikan pada 15 Januari 2007. Sebelumnya juga terjadi deklarasi pendirian Provinsi Papua Selatan pada 12 Januari 2007. Khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya ini mengkalim Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara itu Papua Selatan direncanakan meliputi 4 wilayah yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Sedangkan Irian Jaya Tengah direncanakan berpusat di Nabire, dengan cakupan wilayah-wilayah di perairan Teluk Cendrawasih yang meliputi Kabupaten Biak, Kabupaten Serui, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen Waropen, dan Kabupaten Supiori.

Salah satu tokoh penting di balik gagasan pemekaran daerah Provinsi Papua Barat Daya, yang juga merupakan mantan bupati Kabupaten Sorong, mengungkapkan ide pemekaran khususnya di wilayah Sorong Raya (kepala burung) disebabkan karena kondisi sosial budaya yang sangat bervariasi dan heterogen yang terdiri dari wilayah pesisir, kepulauan, daratan atau tanah besar serta masyarakat di daerah pedalaman. Situasi geografis yang sangat beragam itu menyebabkan proses pembangunan tidak berlangsung maksimal. Oleh sebab itulah menurutnya perlu adanya terobosan untuk percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman harus diakui masih tertinggal dan memerlukan pembangunan fisik untuk membuka

⁵ Catatan lapangan di Kota Ayamaru, ibukota Kabupaten Maybrat pertengahan April 2014.

daerah-daerah isolasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, sosial ekonomi yang berpihak pada penduduk lokal. Oleh sebab itulah pada saat menjabat Bupati Kabupaten Sorong, Yan Piet Wanane memekarkan daerah-daerah operasional baru seperti Kabupaten Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat, dan Tambrauw.⁶

Daerah-daerah yang dimekarkan sebelumnya hanyalah distrik-distrik di wilayah selatan Sorong. Pikirannya saat itu adalah bagaimana wilayah-wilayah tersebut menjadi maju dan tidak terisolir. Anggaran untuk membangun wilayah-wilayah pedalaman kepala burung sangat terbatas di pemerintah Kabupaten Sorong saat itu. Oleh sebab itulah diputuskan untuk melakukan pemekaran-pemekaran daerah agar dapat mengakses dana-dana pembangunan lebih besar. Tantangan yang dihadapi di awal pemekaran memang sangat besar yaitu terbaginya anggaran pembangunan di kabupaten ke daerah-daerah kabupaten baru. Artinya adalah anggaran yang didapat oleh kabupaten induk harus dipecah ke kabupaten-kabupaten baru. Argumentasi ekonomi dan kesejahteraan menjadi isu utama dalam desain pemekaran yang terjadi di wilayah Sorong Raya.

Merancang daerah-daerah pemekaran sangatlah mudah. Hal ini diakui salah satu tokoh pemekaran di Kota Sorong yang mengungkapkan, "Pemekaran daerah itu mudah diperjuangkan di pemerintah pusat (Jakarta). Kita pakai saja alasan wilayah di Papua luas dan tantangan alam yang menghambat kemajuan pasti akan disetujui," ungkapnya. Pengalaman memekarkan wilayah-wilayah di Sorong Raya membuatnya berkeinginan untuk mendirikan Provinsi Papua Barat Daya, memecahkan diri dari provinsi induk Provinsi Papua Barat. Daerah-daerah yang dibayangkan menjadi Provinsi Papua Barat Daya adalah yang berada di wilayah Sorong Raya diantaranya adalah: Kabupaten dan Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat yang akan dimekarkan lagi menjadi 3 kabupaten baru di wilayah pesisir utara, Kabupaten Tambrauw di pegunungan, Sorong Selatan, dan Maybrat.

Cikal bakal ide pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah kekecewaan dari beberapa elit yang berasal dari Sorong yang merasa disingkirkan dari proses perjuangan pembentukan Provinsi Papua Barat. Perasaan ketersingkirkan ini memuncak dengan dipilihnya Manokwari

⁶ Wawancara dengan salah satu tokoh pemekaran di kabupaten-kabupaten Sorong Raya dan ide pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, 16 Februari 2014.

sebagai ibukota Provinsi Papua Barat. "Ibukota Provinsi Papua Barat Daya itu seharusnya di Sorong bukannya di Manokwari. Alasannya adalah agar menjangkau pesisir pantai selatan yaitu Bintuni, Fakfak dan Kaimana. Itu gubernur yang punya ide untuk menjadikan Manokwari sebagai ibukota. Padahal kalau dilihat wilayah yang paling luas itu adalah di Sorong Raya, "tegasnya. Putra-putri dari Sorong Raya juga banyak yang tersebar di Jayapura, Manokwari dan kabupaten-kabupaten lainnya sebagai pejabat di pemerintahan maupun sebagai intelektual dan pengusaha.

Sorong Raya daerahnya luas dan masih memungkinkan untuk dimekarkan kembali. Tokoh pemekaran ini mengungkapkan orang-orang Sorong yang beragam etnik itu agar mempunyai kabupaten sendiri-sendiri agar cepat maju. "Perbedaan suku yang ada di wilayah Sorong ini harus dipecah berdasarkan wilayah administratif. Dengan dipecahnya daerah-daerah tersebut berdasarkan suku-suku maka akan lebih terorganisir karena homogen. Ini akan dengan mudah mengurus kepentingan mereka," ungkapnya.

Pemekaran daerah berdasarkan etnik ini salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Maybrat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 Tahun 2007. Di kabupaten ini masyarakatnya homogen karena sebagian besar masyarakatnya, kurang lebih 95% adalah suku asli asal Maybrat yang terdiri dari 3 suku besar yakni Ayamaru, Aitinyo dan Aifat yang sering disingkat dengan A3. Ketiga suku ini terkenal memiliki solidaritas yang kuat dan sumber daya manusia yang menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan di tanah Papua. Salah satu contohnya adalah mantan Gubernur Papua, Jaap Salossa.

Akar konflik di Kabupaten Maybrat berkaitan dengan perebutan kekuasaan lokal diantara Suku Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat dalam pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal) yang diselenggarakan pada 22 September 2011. Pada pilkadal itu diikuti oleh 4 pasangan calon yaitu: Albert Nakoh-Sidik, Bernard Sagrim-Carel Murafer, Agustinus Saa-Antoh dan Mikael Kambuaya-Yoseph Bless. Mereka memperebutkan 19.831 suara di beberapa distrik yang tersebar di wilayah-wilayah suku Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo (Bintang Papua, diakses 10 April 2014).

Dalam pertarungan Pilkadal itulah sumber konflik pertama yang memperhadapkan Ayamaru-Aitinyo dengan Aifat. Kekuatan calon menjadi mengerucut mempertemukan Bernard Sagrim (Ayamaru) dan Agustinus Saa (Aifat). Konflik berujung pada dilantiknya Bernard Sagrim sebagai

Bupati Maybrat yang diikuti dengan pembakaran kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Maybrat yang terjadi di Kampung Kambuaya Distrik Ayamaru yang terjadi pada Sabtu 5 Maret 2011 (JPNN, 3 November 2011 diakses 9 April 2014). Persoalan lainnya yang menjadi sumber konflik adalah gonjang-ganjing terhadap letak ibukota Maybrat yaitu di Kmurkek (wilayah Suku Aifat) yang sekarang dipindahkan ke Ayamaru sebagai imbas dari konflik awal dimana Bernard Sagrim dari Ayamaru memenangkan Pilkada mengalahkan Agustinus Saa dari Aifat.

Seorang tokoh pemuda saat saya temui di Ayamaru mengungkapkan, alasan pemindahan ibukota dari Kmurkek ke Ayamaru bukan semata-mata karena bupati berasal dari Ayamaru, tetapi lebih kepada persoalan efektifitas jalannya pemerintahan. Selama ibukota di Kmurkek, pejabat bupati melaksanakan tugas di bawah tekanan dan intimidasi oleh masyarakat yang masih tidak puas dengan hasil Pilkada. Inilah konflik awalnya yang merembes kepada konflik lainnya. Menyadari tidak akan menjalankan pemerintahan secara maksimal, Bupati Maybrat akhirnya memindahkan ibukota ke Ayamaru hingga sekarang dan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.⁷

Namun, kasus lain yang menimpahi Bupati Maybrat adalah dugaan melakukan korupsi dan pencucian uang dana hibah senilai Rp 15 miliar. Dana hibah tersebut digunakan untuk persiapan infrastruktur Kabupaten Maybrat, kelengkapan kelembagaan pemerintahan, pelantikan DPRD serta kesiapan pemilukada. Namun dalam pelaksanaannya, dana senilai Rp 3 miliar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dari total seluruh dana Rp 15 miliar yang diberikan. Polda Papua dalam hal ini juga sudah mengajukan surat ijin ke Presiden untuk tindakan penahanan. Namun surat ijin dari presiden belum diturunkan. Pengajuan ijin dilakukan karena Bupati Maybrat adalah pejabat negara (bupati) aktif yang sedang memimpin Kabupaten Maybrat (Suluh Papua, 27 Februari 2014 diakses 10 April 2014).

Dinamika selanjutnya setelah dilakukan pertemuan dengan pemerintah pusat di Jakarta adalah diputuskan bahwa pemerintahan tetap berjalan di Kmurkek. Mempercepat proses diterbitkannya SK Sekda Kabupaten Maybrat, yang mana setelah SK diterbitkan diikuti dengan pelantikan Setda di Kmurkek ibu kota Kabupaten Maybrat. Mendorong terbentuknya Maybrat Sau yang berkedudukan ibu kotanya di Ayamaru.

⁷ Catatan lapangan dan wawancara dengan salah seorang tokoh pemuda di Ayamaru, 6 April 2014.

Ujung dari konflik ini adalah munculnya ide untuk mendorong terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Maybrat Sau yang diyakini sebagai solusi atas konflik yang berkepanjangan di Kabupaten Maybrat (Teropong Online, diakses 10 April 2014).

Kesimpulan

Membaca dinamika pemekaran daerah di kepala burung, perspektif sosial budaya yang transformatif dalam melihat kebudayaan Papua mutlak diperlukan. Ini untuk mengurangi kesalahan penafsiran dan penamaan dalam membaca dinamika kebudayaan yang terjadi. Argumentasi pemekaran daerah yang hanya berdasarkan kesamaan identitas-identitas budaya justru sangat problematik dan berbahaya bagi cita-cita mewujudkan Papua baru yang dinamis dan bermartabat. Pemisahan administrasi dalam pemekaran-pemekaran daerah tidak perlu paralel dengan pemisahan kebudayaan yang selama ini menjadi argumentasi umum di Papua. Contoh kasus konflik di Kabupaten Maybrat yang diuraikan dalam artikel ini menunjukkan hal itu.

Memisahkan diri dari Kabupaten Sorong dan membentuk kabupaten baru berdasarkan jumlah suku-suku mayoritas diakhiri dengan konflik di internal mereka. Desain penataan daerah khususnya di wilayah Papua Barat selayaknya memperhatikan keragaman budaya dan peluang-peluang masyarakat Papua untuk memperbaharui identitas budayanya. Dinamika identitas budaya Papua berkembang seiring dengan akulturasi kebudayaan dan interkoneksi Papua dengan dunia luar. Realitas yang tidak bisa dihindari dan menjadi momentum untuk masyarakat Papua memikirkan identitas dan kebudayaannya melampaui identitas etnik. Hanya dengan demikianlah masyarakat Papua akan mampu berkembang dan merespon transformasi kebudayaan dengan cara pandang baru. Tidak ada momentum untuk kembali ke kebudayaan Papua yang eksotik dan terlokalisir. Pemekaran daerah dan introduksi berbagai program pembangunan dan globalisasi kapital melalui tangan-tangan investasi telah merubah identitas, kebudayaan, dan cara berpikir masyarakat Papua terhadap posisi dirinya kini.

Referensi

- Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI). 2011. "Masih Ada Dusta di Antara Kita: Catatan Kritis Asosiasi Antropologi Indonesia Menuju Papua yang Damai" Jakarta, 11 November 2011.
- Bachtiar, H.W. 1993. "Sejarah Irian Jaya" dalam *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk* (Ed. Koentjaraningrat). Jakarta: Jambatan
- Broek, Theo van den. 1998. Pembangunan, Agama dan Perubahan Masyarakat di Provinsi Irian Jaya dalam *Kekayaan, Agama dan Kekuasaan: Identitas Konflik di Indonesia (Timur) Modern*, Yogyakarta, Kanisius.
- Flassy, Don. 1995. *Pembangunan Berwawasan Identitas, Sebuah Tuntutan di Irian Jaya*. Jayapura: Irian Jaya Studies.
- Kementerian Dalam Negeri dan Kemitraan, 2011. *Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia tahun 2010-2025*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri dan Kemitraan.
- Laksono, P.M. 2002. "Tanpa Tanah, Budaya Nir-Papan, Antropologi Antah Berantah" dalam Lounela, Anu dan R. Yando Zakaria (editor). (2002). *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Yogyakarta: Insist, Jurnal Antropologi Indonesia dan Karsa.
- Laksono, P.M. 2009. "Peta Jalan Antropologi Indonesia Abad Kedua Puluh Satu: Memahami Invisibilitas (Budaya) di Era Globalisasi Kapital". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 27 Oktober 2009.
- Laksono, P.M. 2009a. *Spektrum Budaya (Kita)*, Jogjakarta, Kepel Press kerjasama PSAP UGM.
- Pamungkas, Cahyo. 2004. "Konflik Elit Lokal dalam Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat", *Jurnal Masyarakat Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indonesia*, Jilid XXX. NO. 1. 2004
- Prakarsa Rakyat, 2007. "Situasi Sosial Politik di Wilayah Kepala Burung Provinsi Papua Barat, Inisiatif Perlawanan Lokal Simpul Kepala Burung Papua Januari – Maret 2007".
- Sakrani, 1979. "Laporan Penelitian Aspek Adat-Istiadat Etnografika tentang Suku Arfak" Kantor Departemen P & K Kabupaten Manokwari (Anggota Seksi Adat-Istiadat Proyek Pencatatan Penelitian Kebudayaan Daerah Irian Jaya).
- Suryawan, I Ngurah. 2013. "Identifying the Dynamics and Complexities of Dewan Adat Papua (Papuan Customary Council): Cultural Identities and Responses" dalam *Local Civil Societies Dynamics in Indonesia*. CIDIN Radboud University Nijmegen The Netherlands dan UGM Yogyakarta.
- Suryawan, I Ngurah. 2013. "Tanah Dibutuhkan Tapi Orang Tidak: Transformasi Masyarakat Adat dalam Perspektif Etnografi dan Sejarah Sosial" dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 2 Juli – Desember 2013.
- Suryawan, I Ngurah. 2012. *Jiwa yang Patah*, Yogyakarta, Kepel Press.

- Suryawan, I Ngurah. 2012b. "Politik Ruang (Pasar) dan Pemekaran Daerah: Siasat Rakyat Papua di Garis Depan Global" dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 1 Februari – Juli 2012.
- Suryawan, I Ngurah. 2011. "Antropologi Gerakan Sosial: Membaca Transformasi Identitas Budaya di Kota Manokwari, Papua Barat" dalam *Humaniora, Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011 (290-300)
- Suryawan, I Ngurah. 2011. "Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)* Volume 15, Nomor 2, November 2011 (140-153).
- Timmer, Jaap. 2013. "Menentang Kulturalisme di Tanah Papua" dalam I Ngurah Suryawan, *Jiwa yang Patah*. Yogyakarta: Kepel Press dan Pusat Bahasa dan Budaya Papua UNIPA Manokwari.
- Tsing, Anna Lowenhaupt, 2005. *Friction: An Ethnography Of Global Connection*, Princeton University Press
- Widjojo dkk, Muridan. 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Past and Securing the Future*. Jakarta: Buku Obor, LIPI dan TIFA.

Sumber Internet

- "Inilah 33 Pemekaran (DOB) di Tanah Papua yang Disepakati oleh DPR-RI" dalam <http://tabloidjubi.com/2013/10/25/inilah-33-pemekaran-dob-di-tanah-papua-yang-disepakati-dpr-ri/> (diakses 12 Januari 2014).
- "DPR-RI Setujui 33 DOB di Tanah Papua, Banyak Pihak Menolak" dalam <http://majalahselangkah.com/content/dpr-ri-setujui-33-dob-di-tanah-papua-banyak-pihak-menolak> (diakses 12 Januari 2014)
- <http://www.jpnn.com/read/2011/03/11/86407/Anggota-DPRD-jadi-Tersangka-Pembakaran-Kantor-> (Diakses 9 April 2014).
- <http://www.teropongonline.com/detail-3534-soal-ibukota-maybrat--pertemuan-kemendagri-berhasil-keluar-3-butir-kesepakatan-.html> (Diakses 10 April 2014).
- <http://www.jpnn.com/read/2011/03/11/86407/Anggota-DPRD-jadi-Tersangka-Pembakaran-Kantor-> (Diakses 9 April 2014).
- <http://www.bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/papua-barat/item/8867-maybrat-tidak-akan-dikembalikan-ke-kabupaten-induk> (diakses 10 April 2014)
- <http://www.bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/papua-barat/item/8815-penghapusan-maybrat-bisa-picu-gelombang-tsunami-politik> (diakses 10 April 2014)